



KABUPATEN
LANGKAT

LAPORAN KINERJA 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG



H. SYAH AFANDIN, SH
BUPATI LANGKAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun dan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, serta untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi dan misi Bupati seperti yang telah ditetapkan.

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2024 memuat informasi yang transparan dan akuntabel mengenai capaian sasaran, pelaksanaan program, serta penggunaan anggaran yang telah dilakukan. Laporan ini juga mencerminkan komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan tidak sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat sehingga dapat bermanfaat dan berdampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Langkat.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja kami, serta menjadi bahan pertimbangan yang berguna dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk masa depan yang lebih baik. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasi.

Stabat,

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KABUPATEN LANGKAT**



KHAIRUL AZMI, S.STP

PEMBINA TK. I

NIP. 19850216 200312 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Taat Ruang pada tahun 2024. LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LAKIP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu LAKIP ini juga mengungkapkan startegi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran adalah 100%, atau sama dengan capaian berkatagori BAIK SEKALI (85 s/d 100).
2. Tingkat capaian Perjanjian Kinerja adalah 100%; yang terdiri dari 8 program dan 170 kegiatan. atau sama dengan capaian berkatagori BAIK SEKALI (85 s/d 100).
3. Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 100%. atau sama dengan capaian berkatagori BAIK SEKALI (85 s/d 100).
4. Pelaksanaan anggaran P.APBD tahun 2024 sebesar Rp. 179.389.119.497,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 167.432.998.198,00 atau sama dengan 93,34%.
5. Realisasi keuangan sebesar 93,34% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 84,56 % atau katagori baik, capaian kinerja perjanjian kinerja sebesar 88,56 % serta capaian indikator kinerja utama :100%.

Berikut ini adalah rincian capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	59,8	62,44	104,41
2	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Pelayanan Air minum	15%	9,84%	65,6%
3	Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	100%	0%	0%
4	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	96%	80,49%	83,84%
5	Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	64%	65,54%	102,4%
6	Persentase Kesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100%	100%	100%

7	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur	33%	29,12%	97,06 %
8	Nilai Evaluasi Implementasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (70-80)	BB (70,05)	100%

Dalam mencapai kinerja yang ditargetkan dilakukan berbagai upaya, Adapun kendala yang dialami adalah kurangnya anggaran yang diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, pelaksanaan pekerjaan agak terkendala dikarenakan terlambatnya perencanaan dan pelaksanaan tender, sehingga menyebabkan terjadinya proyek yang tidak selesai hingga akhir Tahun 2024. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan kendala yang dialami tahun mendatang diharapkan kepada semua pihak agar kiranya pelaksanaan tender dapat dipercepat sehingga permasalahan selama ini tidak lagi terjadi ditahun mendatang, Besarnya anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dibesarkan lagi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi
- 1.5. Potensi, Isi Strategis dan Permasalahan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan 2019-2024
- 2.2. Perjanjian Kinerja Dinas PUTR Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Dinas PUTR
 - 3.1.1. Pengukuran Kinerja
 - 3.1.2. Analisis Capaian Kinerja
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Lampiran 2. Piagam Penghargaan Pada Tahun 2024
- Lampiran 3. Dokumen lainnya yang dianggap perlu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat senantiasa berupaya untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi di kabupaten langkat sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendorong terwujudnya good governance Dinas Pekerjaan umum dan Tata ruang Kabupaten Langkat harus mampu menjawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimize sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi sehingga mampu menjawab pelaksanaan fungsi yang diembannya.

Hal ini sejalan dengan TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Media pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat yang berisikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam hubungannya dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategik Tahun 2020-2024.

Laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan juga sebagai suatu upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja. Laporan kinerja ini merupakan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan untuk:

1. **Menilai Capaian Kinerja:** Tujuan utama dari penyusunan LKIP adalah untuk menilai sejauh mana sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran tercapai. Ini mencakup pencapaian program, kegiatan, dan indikator kinerja yang telah direncanakan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian tersebut.
2. **Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi:** LKIP disusun untuk meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada publik, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya negara dan hasil yang dicapai. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memastikan adanya transparansi dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran.
3. **Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Anggaran:** Laporan ini juga bertujuan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa alokasi dana yang telah diberikan sesuai dengan prioritas pembangunan dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

4. **Dasar Evaluasi dan Perbaikan Kinerja:** LKIP menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja pemerintah. Melalui analisis capaian dan kendala yang ditemukan, laporan ini dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan serta strategi pelaksanaan program di masa depan.
5. **Meningkatkan Kepercayaan Publik:** Dengan adanya laporan yang transparan, obyektif, dan akuntabel, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Hal ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2024, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – undnag Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kota Madya Fati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat;
9. Peraturan Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang;
10. Peraturan Pemerintahah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

1.4. Kedudukan, tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Langkat Nomor 20 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unit kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki tugas yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang yang diserahkan oleh kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan Bupati Langkat Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

1. Menetapkan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang Pekerjaan Umum.
2. Merumuskan dan mengembangkan kebijaksanaan sistem dibidang Pekerjaan Umum.
3. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang Pekerjaan Umum.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
5. Menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dibidang Pekerjaan Umum serta penilaian atas pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dibidang Tekhnis administrasi, dan pada pelaksanaann tugasnya dibantu oleh Kasubag Umum, Perencanaan dan Informasi Publik dan Kasubag Tata Usaha.

c. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan dibidang Pengairan, dan pada pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Kasi Perencanaan Sumber Daya Air, Kasi Pelaksanaan dan Kasi Operasi dan Pemeliharaan.

d. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan dibidang Bina Marga yaitu kegiatan yang berkaitan dengan Jalan dan Jembatan serta pada pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Kasi Perencanaan Teknis dan Evaluasi, Kasi Pelaksanaan Jalan dan Jembatan dan Kasi Peralatan.

e. Bidang Cipta Karya

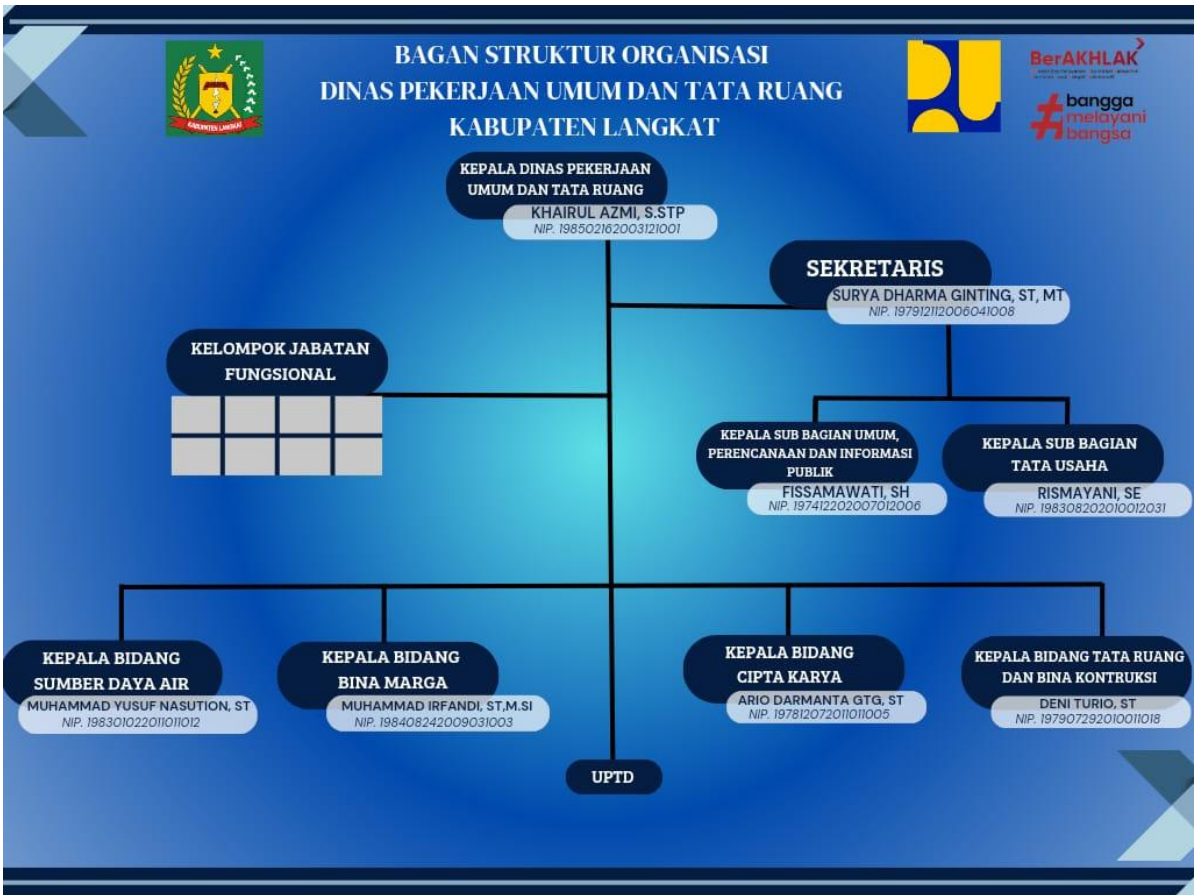
Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan dibidang Cipta Karya yaitu kegiatan yang berkaitan dengan Gedung, Sanitasi serta sarana aparatur lainnya. dan pada pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Kasi Perencanaan Teknis dan Evaluasi, Kasi Pelaksanaan dan Pengendalian Penataan Ruang dan Kasi Pelaksanaan Bangunan Gedung.

f. Bidang Tata Ruang

mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan, melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan peraturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Langkat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku menyelenggarakan fungsi.

Adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang bila digambarkan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar berikut :

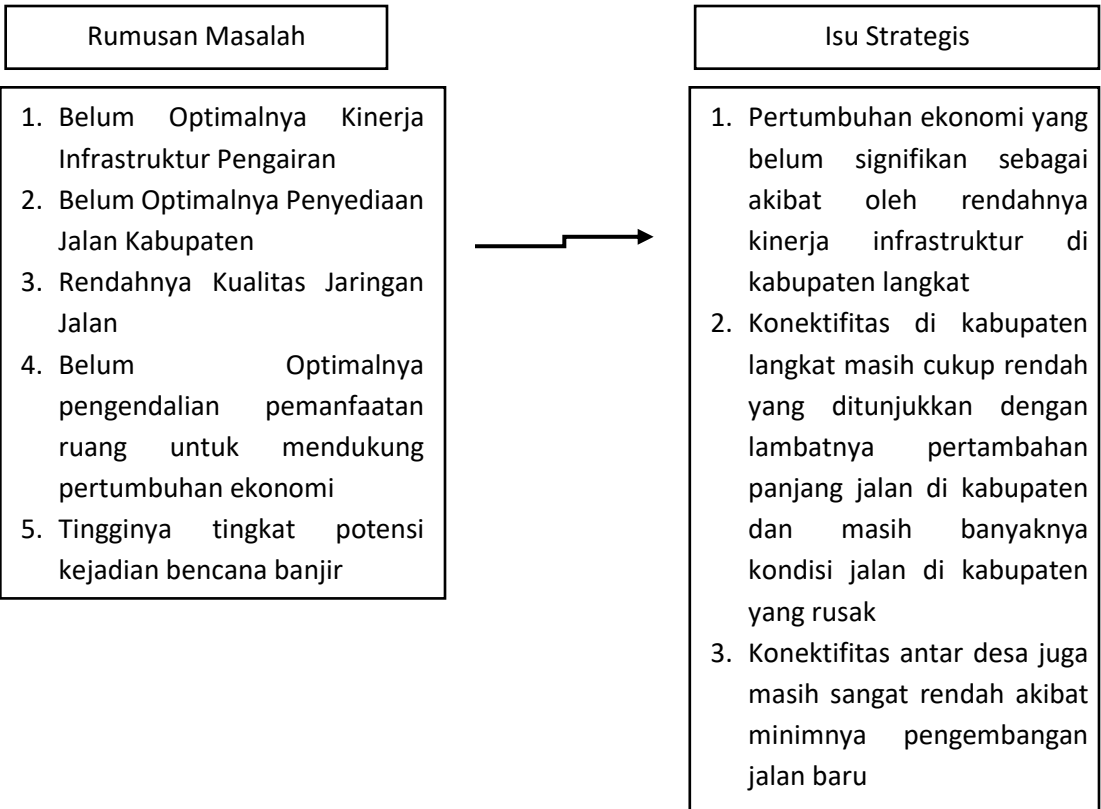
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN LANGKAT



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat.

Isu strategis yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam gambar dibawah ini :



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2019 – 2024

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Langkat yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 hingga 2024 merujuk pada P-RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat.

Berdasarkan P-RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024, Visi Kabupaten Langkat 2019-2024 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Langkat yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

**“MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS
MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG
BERKELANJUTAN”**

Makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Langkat, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Langkat dan isinya. Artinya Kabupaten Langkat dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Maju, Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi.

Kemajuan daerah, Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.

Sejahtera, masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat juga terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Religius, Kabupaten Langkat yang religius terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama juga diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparatur pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pariwisata, adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan

Pemerintah Daerah. Selain itu, terkait juga dengan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 4 (empat) pilar pariwisata (destinasi, industry, pemasaran, dan kelembagaan) serta bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Infrastruktur, adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK, perumahan dan permukiman, energi, dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, maupun masyarakat.

Berkelanjutan Pembangunan, Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Langkat sebagai berikut.

1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan
5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2020 – 2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2019-2024 tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat yang merupakan Perangkat Daerah dengan tugas dan pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dalam melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah menetapkan tujuan yang mengacu pada misi 4 (empat) yaitu “meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan”.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat menetapkan 4 (empat) sasaran strategis :

1. Meningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.
2. Meningkatnya konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur jalan.
3. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang.
4. Menurunnya resiko kejadian bencana.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2019-2024, dapat dijabarkan sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Menurunnya Kesenjangan Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Tata Ruang	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	52	57,30	59,20	59,50	59,80
			Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik	177	221	251	281	311
		Meningkatnya Akse Masyarakat terhadap Infrastruktur yang Mencakup Layanan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Pelayanan Air minum	9,51	10	11	14	15
		Meningaktnya Kesesuaian Pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	n/a	100	100	100	100
		Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung Pendayagunaan Serta Pengendalian Daya Rusak Air	Panjang Sungai / Saluran yang Tekonservasi	10.620	12.720	12.730	12.740	12.750
			Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	68,82	75	80	84	85
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	CC (50-60)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Metodologi / Definisi Operasional	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	$\frac{(\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik} \pm \text{Kondisi Sedang})}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$	Kegiatan Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jalan pada Ruas Jalan guna menaikkan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	- Dinas PUTR
2	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur yang mencakup Layanan Air Minum, Layanan Persampahan Layanan Sanitasi dan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Pelayanan Air Minum	$\frac{\text{Jumlah Kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan}}{\text{Jumlah Total Proyeksi Rumah Tangga}} \times 100\%$	Kegiatan Pembangunan dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Setiap Tahunnya di Wilayah Kurang Air Bersih Guna Menaikkan Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Pelayanan Air Minum	- Dinas PUTR - PDAM - BPS
		Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	$\frac{\text{Jumlah Infrastruktur Persampahan yang dibangun}}{\text{Jumlah Total Rencana Persampahan yang dibangun}} \times 100\%$	Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Konstruksi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Wilayah Prioritas Kabupaten	- Dinas PUTR - Dinas LH
		Persentase Rumah Tangga yang mendapat Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	$\frac{\text{Jumlah Kumalatif Masyarakat Rumah Tangga yang Mendapat Layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat}}{\text{Jumlah Total Proyek Rumah Tangga}} \times 100\%$	Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kota GunaMenaikkan Persentase Rumah Tangga yang mendapat Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	- Dinas PUTR - Dinas LH
		Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi baik}}{\text{Jumlah Total Panjang Jaringan Drainase Perkotaan yang terhubung langsung dengan sunga}} \times 100\%$	Kegiatan Mengoptimalkan Sistem Drainase Perkotaan yang terhubung Langsung dengan Sungai guna menaikkan persentase Panjang Jaringan drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	- Dinas PUTR

3	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	$\frac{\text{Jumlah Perizinan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang}}{\text{Jumlah Total Perizinan Pemanfaatan Ruang}} \times 100\%$	Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Tata Ruang Terdiri dari Dokumen Perda RTRW, Dokumen Ranperkada RDTR, KLHS, KKPR, dan PBG Guna Guna Menaikkan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	- Dinas PUTR
4	Meningkatnya Upaya Pencegahan Bencana Banjir	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur	$\frac{\text{Jumlah Luas Wilayah Rawan Bencana Banjir Yang Terlindungi oleh Infrastruktur}}{\text{Jumlah Total Luas Wilayah Rawan Bencana Banjir}} \times 100\%$	Kegiatan Membangun Bantaran dan Tanggul Sungai, Turap/Talud dan Bronjong Serta Menormalisasi/Restorasi Sungai/ Saluran Guna menurunkan Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir Terlindungi oleh Infrastruktur	- Dinas PUTR - BPBD
5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil Evaluasi yang Dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat Tahun (N)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Rangkaian Sistematis Pertanggung Jawaban dan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah	- Dinas PUTR

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2020 – 2024

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan kinerja Infrstruktur Jalan	Meningkatnya Penyediaan Jalan Kabupaten	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kabupaten terutama di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah
2	Meningkatnya Akse Masyarakat terhadap Infrastruktur yang Mencakup Layanan Air Minum	Meningkatnya Cakupan Layanan Sanitasi dan Air Limbah	Peningkatan ketrediaan jaringan air bersih di kawasan perkotaan dan Perdesaan
		Meningkatkan Cakupan Layanan Sanitasi dan Air Limbah	Peningkatan ketersediaan sistem sanitasi dan air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan
		Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Peningkatan ketersediaan sarana persampahan Peningkatan cakupan layanan persampahan di kawasan perkotaan
3	Meningaktnya Kesesuaian Pemanfaatan ruang	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan penyusunan rencana tata ruang Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian ruang berbasis sistem informasi penataan ruang
4	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung Pendayagunaan Serta Pengendalian Daya Rusak Air	Menurunkan tingkat risiko bencana banjir	Optimalisasi kapasitas saluran drainase primer, sekunder
5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	

2.1.3. Struktur Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan
Meningkatnya Akse Masyarakat terhadap Infrastruktur yang Mencakup Layanan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Meningaknya Kesesuaian Pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung Pendayagunaan Serta Pengendalian Daya Rusak Air	Program Sumber Daya Air
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	

2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Langkat adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	59,8%
2	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur yang mencakup Layanan Air Minum, Layanan Persampahan Layanan Sanitasi dan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Pelayanan Air Minum	15%
		Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	100%
		Persentase Rumah Tangga yang mendapat Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	96%
		Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	64%
3	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan rencana Tata Ruang	100%
4	Meningkatnya Upaya Pencegahan Bencana Banjir	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur	33%
5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B (70-80)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.273.361.270,00
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	13.691.190.427,00
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.544.373.800,00
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.763.800.000,00
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.031.750.000,00
6	Program Penataan Bangunan Gedung	18.925.793.000,00
7	Program Penyelenggaraan Jalan	107.883.163.000,00
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.275.688.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2024

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat merupakan kinerja tahun ke 5 atau tepatnya tahun terakhir pada periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat. Adapun hasil pengukuran atas capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	59,80	62,44	104,41
Sasaran Strategis 2				
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur yang mencakup Layanan Air Minum, Layanan Persampahan Layanan Sanitasi dan Sistem Drainase Perkotaan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Pelayanan Air Minum	15	9,84	65,6
2	Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	100	0	0
3	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	96	80,49	83,84
4	Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	64	65,54	102,4

Sasaran Strategis 3				
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan rencana Tata Ruang	100	100	100
Sasaran Strategis 4				
Meningkatnya Upaya Pencegahan Bencana Banjir				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur	33	29,12	97,06
Sasaran Strategis 5				
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah				
Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah		BB (70-80)	BB (70,05)	100%

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 :
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan
Indikator 1 :
Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	59,80	62,44	104 %

Salah satu misi kabupaten langkat ialah berfokus pada meningkatnya kualitas infrastruktur jalan kabupaten langkat, sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas menjalankan tugas dan fungsi memantu bupati dalam penyelenggaraan infrastruktur

sehingga menjadikan salah satu sasaran strategis dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat berfokus pada peningkatan infrastruktur umum. Demikian pula untuk melihat capaian kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat pada tahun 2023 mengacu pada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah tersaji diperubahan renstra 2019-2024 dan perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2024. Seperti terlihat pada tabel di atas realisasi untuk sasaran satu di tahun 2024 sebesar 62,44%, sedangkan target 59,80% dan capaian 104% diperoleh dari hasil kinerja yang dilakukan selama 1 tahun oleh bidang bina marga dinas pekerjaan umum dan tata ruang kabupaten langkat.

Total panjang jalan kabupaten langkat adalah sepanjang 1.561.300 km dan pada tahun 2024 jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 62,44 sebagaimana diuraikan dibawah ini :

No	Kondisi Jalan	Tahun 2024
1	Baik	611,12
2	Sedang	363,81
3	Rusak	11,51
4	Rusak Berat	574,85
	Jumlah	1.561.300

jika dilihat berdasarkan kecamatan pada tahun 2024, maka kecamatan yang memiliki jalan kabupaten terpanjang adalah kecamatan stabat yaitu 140,64 km dan yang terpendek adalah kecamatan sirapit sepanjang 33,70 km. Jika dilihat dari kondisi jalan maka kecamatan stabat merupakan kecamatan tertinggi dengan kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik yaitu 72,060%, sementara kecamatan dengan kondisi jalan kabupaten dalam kondisi rusak terbesar kecamatan besitang yaitu 51,550%. Secara rinci seperti dijawabarkan di bawah ini :

No	Kecamatan	Kondisi Jalan (Km)				Total
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Bahorok	35,910	18,938	1,000	38,742	94.590
2	Sirapit	20,800	1,270	0,000	2,240	24.310
3	Salapian	39,810	6,440	0,150	27,220	73.620
4	Kutambaru	11,855	12,220	0,400	40,295	64.770
5	Sei Bingai	43,239	23,345	0,000	36,336	102.920
6	Kuala	31,390	24,950	0,000	25,960	82.300
7	Selesai	49,665	11,190	1,200	31,415	93.470
8	Binjai	18,990	12,060	0,000	11,270	42.320
9	Stabat	72,060	43,520	0,100	24,890	140.570

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2024

10	Wampu	17,280	2,900	0,000	35,860	56.040
11	Batang Serangan	17,280	17,720	0,000	33,520	61.520
12	Sawit Seberang	12,150	6,300	0,000	20,050	38.500
13	Padang Tualang	24,550	23,160	0,000	22,050	76.760
14	Hinai	18,590	14,810	0,000	34,740	68.140
15	Secanggang	48,840	42,190	1,400	15,040	107.470
16	Tanjung Pura	28,160	5,610	0,000	22,130	55.900
17	Gebang	22,875	18,400	0,200	13,655	55.130
18	Babalan	28,130	16,840	0,210	23,990	69.170
19	Sei Lapan	10,400	19,060	0,200	26,520	56.180
20	Berandan Barat	11,120	2,370	0,000	5,990	19.480
21	Besitang	22,700	19,870	1,800	51,550	95.920
22	Pangkalan Susu	17,880	9,530	2,700	7,650	37.760
23	Pematang Jaya	7,450	11,120	2,150	23,740	44.460

Dalam mencapai target kinerja tersebut, didukung oleh kinerja Bidang Bina Marga Sebagaimana hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

REALISASI KINERJA TAHUN 2024
BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	59,80	62,44

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 – 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	58%	59%	63,23%	59,20%	59,80	62,44%	104,41%

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2024)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	62,44	59,80	104,41

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	59,20%	62,44%	104%

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	59,80	62,44	104,41	- Penanganan Jalan pada Tahun 2023 masih terdapat Ruas Jalan Desa yang ditangani, tentunya hal ini mempengaruhi persentase kemantapan Jalan Kabupaten Langkat, - Dilakukan penyesuaian dalam memenuhi kesiapan daerah untuk menerima Dana Alokasi Khusus TA. 2025, - Faktor Teknis Jalan yang sudah mencapai usia rencana sehingga mengalami penurunan	- Menambah anggaran pemeliharaan rutin Jalan Kabupaten, - Melakukan tindakan disiplin pengguna jalan yang melanggar aturan dalam berkendara, terutama kendaraan <i>Over Load</i> yang melintas di Jalan Kabupaten Langkat, - Meningkatkan Proporsi Alokasi Dana Pembangunan Jalan ke

					kemampuan jalan dalam menerima beban yang bekerja, - Faktor ketertiban pengguna jalan yang tidak sesuai peraturan, seperti kendaraan ODOL (<i>Over Dimension, Over Loading</i>) dimensi berlebih dan beban berlebih.	Ruas Jalan Kabupaten.
--	--	--	--	--	--	-----------------------

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupten Langkat berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	59,80	62,44	104,41	107.883.163.000	101.943.227.635	94,49%	-

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	104,41	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	62,44	Menunjang	-

Sasaran 2 :

Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur yang mencakup Layanan Air Minum, Layanan Persampahan Layanan Sanitasi dan Sistem Drainase Perkotaan

Indikator 2 :

1. Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Pelayanan Air Minum
2. Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun
3. Persentase Rumah Tangga yang mendapat Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik
4. Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur yang mencakup Layanan Air Minum, Layanan Persampahan	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Pelayanan Air Minum	15%	9,84%	65,6%
	Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	100%	0%	0%
	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	96%	80,49%	83,84%
	Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	64%	65,54%	102,4%

Dalam mencapai target kinerja tersebut, didukung oleh kinerja Bidang Cipta Karya Sebagaimana hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

REALISASI KINERJA TAHUN 2024
BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur yang mencakup Layanan Air Minum, Layanan Persampahan	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Pelayanan Air Minum	15%	9,84%
		Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	100%	0%
		Persentase Rumah Tangga yang mendapat Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	96%	80,49%
		Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	64%	65,54%

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 – 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur yang mencakup Layanan Air Minum, Layanan Persampahan	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Pelayanan Air Minum	-	9,06%	9,54%	9,76%	15%	9,84%	9,84%
	Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	-	-	-	-	-	-	0%
	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-	64,75	64,75	96%	80,49%	80,49%
	Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	-	61,38	62,56	63,74	64%	65,54%	102,4%

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2024)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur yang mencakup Layanan Air Minum, Layanan Persampahan	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Pelayanan Air Minum	15%	9,84%	65,6%
	Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	100%	0%	0%
	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	96%	80,49%	83,84%
	Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	64%	65,54%	102,4%

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur yang mencakup Layanan Air Minum, Layanan Persampahan	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Pelayanan Air Minum	9,76%	-	-
	Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	-	-	-
	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	64,75	-	-
	Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	63,74	-	-

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur yang mencakup Layanan Air Minum, Layanan Persampahan	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Pelayanan Air Minum	15%	9,84%	65,6%	Terbatasnya Anggaran dalam penanganan Program SPAM Jaringan Perpipaan dan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Iuran Retribusi Air Bersih	Memohon kepada Pemerintah Pusat dalam Penyediaan Anggaran DAK agar dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat di Daerah yang kurang Air Bersih
	Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	100%	0%	0%	Anggaran yang disediakan untuk Program Layanan Persampahan tidak dapat mengakomodasi Proyek yang Direncanakan	Dapat memfokuskan Anggaran untuk Program Persampahan Regional agar dapat dilaksanakan
	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	96%	80,49%	83,84%	Terbatasnya Anggaran dalam penanganan Program SPALD dan Kesadaran Masyarakat dalam mengelola Air Limbah	Memohon kepada Pemerintah Pusat dalam Penyediaan Anggaran DAK agar dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat di

						Daerah yang kurang akses Layanan Sanitasi
	Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	64%	65,54%	102,4%	Kesulitan dalam menghadapi Masyarakat yang berjualan di atas trotoar yang akan dibenahi Jaringan Drainase	Melakukan Sosialisasi dan Solusi agar Masyarakat UMKM masih dapat beraktifitas walaupun sedang mengalami Perbaikan Jaringan Drainase di Wilayah Perkotaan

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur yang mencakup Layanan Air Minum, Layanan Persampaha	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Pelayanan Minum Akses Air	15%	9,84%	65,6%	3.544.373.800	3.131.131.977	88,34%	-
	Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	100%	0%	0%	-	-	0%	-
	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	96%	80,49%	83,84%	9.763.800.000	9.589.669.630	98,21%	-
	Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	64%	65,54%	102,4%	2.031.750.000	1.987.403.500	97,81%	-

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur yang mencakup Layanan Air Minum, Layanan Persampahan	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Pelayanan Air Minum	9,84%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur yang Mencakup Layanan Air Minum	9,84%	Menunjang	-
	Persentase Infrastruktur Persampahan yang dibangun	0%	-	Jumlah TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS yang Dibangun dan yang Direhabilitasi	0%	Tidak Menunjang	-
	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	80,49%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Rumah Tinggal yang Dibangun Infrastruktur Layanan Sanitasi Layak dan Aman	80,49%	Menunjang	-
	Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	65,54%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang Jaringan Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	65,54%	Menunjang	-

Sasaran 3 :
Meningkatnya Kesesuain Pemanfaatan Ruang

Indikator 3 :

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan rencana Tata Ruang

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kesesuain Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan rencana Tata Ruang	100%	100%	100%

Indikator tersebut berkaitan dengan izin yang sudah keluar dari dinas PUTR kab.langkat melalui Bidang Tataruang & Bina Konstruksi, adapun perhitungan itu berdasarkan pemanfaatan izin yg dimohonkan pemohon dengan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang, sehingga pemanfaatan izin yang akan di dapat sesuai dengan rencana tata ruang kab langkat, nilai capaian didapat dari total izin yang keluar dengan kesesuaian rencana tata ruang yang ada untuk saat ini izin KKPR yang keluar sudah sesuai semua dengan rencana tara ruang kab.langkat sehingga menghasilkan capaian 100%, adapun upaya untuk mencapai target tersebut dengan mengundang seluruh stake holder saat rapat sidang Forum Penataan Ruang sebelum izin di dikeluarkan sehingga rencana tataruang maupun rencana dari OPD lain tetap sesuai dan berkesinambungan, meningkatnya pencapaian ini didukung oleh team Kepala Bidang Tataruang dan Bina Konstruksi melalui jafung nya yang selalu memberikan masukan terkait rencana tataruang wilayah yang ada sehingga tidak ada izin yang keluar tidak sesuai dengan rencana tataruang

Dalam mencapai target kinerja tersebut, didukung oleh kinerja Bidang Tata Ruang Bina Konstruksi Sebagaimana hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

REALISASI KINERJA TAHUN 2024
BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kesesuain Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan rencana Tata Ruang	100%	100%

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 – 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan rencana Tata Ruang	100%	100%	100%	100%	15%	100%	100%

Kondisi dari tahun ke tahun cenderung sama trend nya kondisi ini karena izin yang di keluarkan semuanya sesuai dengan tata ruang sehingga tidak ada izin yang keluar tidak sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga para pemohon izin tidak ada yang memanfaatkan lahannya tidak sesuai dengan tata ruang yang ada di kab.langkat

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2024)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = (3) / (4) \times 100\%$
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan rencana Tata Ruang	100%	100%	100%

Capaian pada Tahun 2024 sudah sesuai dengan rencana.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = (3) / (4) \times 100\%$
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan rencana Tata Ruang	100%	100%	100%

Sampai saat ini sudah baik dan sesuai terintegrasi dengan RTRW PROVINSI Sumatera Utara.

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan rencana Tata Ruang	100%	100%	100%	Tercapainya target ini dikarenakan kerjasama seluruh stake holder yang ada pada Forum Penataan ruang sehingga tidak ada izin yang keluar tidak sesuai dengan tata ruang kab.langkat	Adapun perlu untuk menjaga capaian ini tetap tercapai adalah dengan memberikan sdm dan anggaran yang cukup pada bidang tataruang dan bikon untuk melaksanakan pengawasan dan sosialisasi terkait rencana tata ruang kab.langkat

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan rencana Tata Ruang	100	100	100	4.275.688.000	3.224.536.254	100	-

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan rencana Tata Ruang	100	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	100	100	Menjunjang	Sangat menunjang karena sesuai dengan tupoksi jafung tataruang

Sasaran 4 :
Meningkatnya Upaya Pencegahan Bencana Banjir

Indikator 4 :

Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Upaya Pencegahan Bencana Banjir	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur	33%	29,12%	97,06 %

Luas Kawasan Pemukiman Yang Terlindungi Infrastruktur 424 (ha) / Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir 1.456,09 (ha) = 29,12%. Dengan dilaksanakannya kegiatan pencegahan bencana banjir maka akan berkurang luas kawasan permukiman yang rawan banjir dan dapat di capai target yang diinginkan, sampai sejauh ini hasilnya belum tercapai.

Dalam mencapai target kinerja tersebut, didukung oleh kinerja Bidang Sumber Daya Air Sebagaimana hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

REALISASI KINERJA TAHUN 2024
BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Upaya Pencegahan Bencana Banjir	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur	33%	29,12%

Terdiri dari 17 kecamatan di kabupaten langkat dengan Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir 1.456 (ha) di bagi dengan Luas Kawasan Pemukiman Yang Terlindungi Infrastruktur (ha).

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 – 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Upaya Pencegahan Bencana Banjir	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur	-	-	29,80 %	29,80 %	33%	29,12 %	97,06 %

- Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir makin meningkat dari tahun ke tahun seiring dari intensitas hujan yang meningkat.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2024)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = (3) / (4) \times 100\%$
Meningkatnya Upaya Pencegahan Bencana Banjir	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur	29,12 %	33,00 %	97,06 %

Target belum tercapai di karenakan kurangnya anggaran pada program infrastruktur pengendali banjir, namun tetap dilakukan usaha yang maksimal untuk mencapai target tersebut.

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = (3) / (4) \times 100\%$
Meningkatnya Upaya Pencegahan Bencana Banjir	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur	29,80 %	-	-

Sampai saat ini sudah baik dan sesuai terintegrasi dengan RTRW PROVINSI Sumatera Utara.

5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi / Upaya yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Upaya Pencegahan Bencana Banjir	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur	33 %	29,12%	97,06 %	- Belum tercapai, di karenakan kurangnya anggaran pada program infrastruktur pengendali banjir, namun tetap dilakukan usaha yang maksimal untuk mencapai target tersebut	- Kurangnya anggaran, serta terbatasnya waktu dalam pengerjaan kegiatan - Wilayah yang menjadi usulan bukan kewenangan kabupaten langkat

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 / PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Adapun rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Dengan demikian, berikut disampaikan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Upaya Pencegahan Bencana Banjir	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur	33 %	29,12%	97,06 %	13.691.190.427	12.398.231.969	90,55	-

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
Meningkatnya Upaya Pencegahan Bencana Banjir	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur	29,12 %	Program Pengelolaan Sumber Daya Air SDA	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur	29,12 %	Menunjang	-

Sasaran 5 :

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah

Indikator 5 :

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	30	5,04	7,74	12,15	24,93
Pengukuran Kinerja	30	5,40	6,66	11,10	23,16
Pelaporan Kinerja	15	2,10	3,06	4,20	9,36
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,35	3,00	6,25	12,60
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	15,89	20,46	33,70	70,05

A. Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja

1. Telah tersedia pedoman dokumen teknis perencanaan kinerja.
2. Telah ada dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.
3. Telah ada dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.
4. Telah ada dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.
5. Telah ada dokumen perencanaan akifitas yang mendukung kinerja.
6. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

b. Kondisi Kualitas Perencancan Kinerja

1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
3. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
5. Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi KinerjaUtama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable-tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
7. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
8. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
9. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

10. Setiap unit/satuan kerja telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
11. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

c. Kondisi Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
2. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*.
4. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis walaupun Evaluasi capaian kinerja sudah dilaksanakan tetapi belum dituangkan/ disusun dalam dokumen R A.
5. Telah ada perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil evaluasi SAKIP sebelumnya.
6. Telah ada perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
7. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, namun belum maksimal.
8. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, namun belum maksimal.

2. Pengukuran Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja

1. Telah ada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
2. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan (SOP).

b. Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja

1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
3. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
4. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala.
5. Setiap level dalam organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, namun pemantauan atas pengukuran yang dilaksanakan belum maksimal.
6. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
7. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

c. Kondisi Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

1. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
2. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.

3. Pengukuran kinerja belum maksimal dalam mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
6. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
7. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
8. Belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
9. Setiap unit satuan kerja secara umum telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
10. Belum seluruh pegawai dapat memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja.

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja

1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
2. Dokumen Laporan Kinerja belum disusun secara berkala.
3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
4. Dokumen Laporan Kinerja (LKIP) belum direviu.
5. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
6. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

b. Kondisi Kualitas Pelaporan Kinerja.

1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
2. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
6. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasikineija dengan realiasi kineija di level nasional/intemasional (Benchmark Kinerja).
7. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/ atau hambatannya.
8. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kineija.
9. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kineija).

c. Kondisi Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

1. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai.

3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi Pencapaian keberhasilan kinerja.
6. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
7. Informasi dalam laporan kinerja belum secara maksimal dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

- a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Internal.
 1. Telah ada pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
 2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh APIP.
 3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang.
- b. Kondisi Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Internal
 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
 2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
 3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
 5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- c. Kondisi Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Internal
 1. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum maksimal ditindaklanjuti.
 2. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.
 3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
 4. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
 5. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

- 1) Agar setiap unit/satuan kerja dapat secara maksimal dalam memahami dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- 2) Agar setiap Pegawai dapat secara maksimal dalam memahami dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja.

- 1) Agar setiap level dalam organisasi dapat secara maksimal dalam melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, dengan mendokumentasikan seluruh pelaksanaan pemantauan Serta melengkapi dokumen atas hasil pemantauan yang telah dilakukan.
- 2) Agar dalam pengumpulan data kinerja dapat memanfaatkan Teknologi Infomasi (Aplikasi).
- 3) Agar pengukuran capaian kinerja dapat memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- 4) Agar pengukuran Kinerja dapat dijadikan dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- 5) Agar Pengukuran kinerja dapat secara maksimal dalam mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- 6) Agar dapat memaksimalkan potensi Seluruh Pegawai untuk turut serta dalam memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, serta berkomitmendalam mencapai kinerja yang telah direncanakan sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal.

3. Pelaporan Kinerja.

- 1) Agar dapat menyusun Dokumen Laporan Kinerja secara berkala.
- 2) Agar Perangkat Daerah mengajukan permohonan terhadap Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD.
- 3) Agar informasi dalam laporan kinerja dapat menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- 4) Agar Informasi dalam laporan kinerja dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

- 1) Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **internal** dapat dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) sehingga diharapkan evaluasi dapat berjalan lebih maksimal.
- 2) Agar Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja **internal** dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

1.1. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 179.389.119.497,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 167.432.998.198,- atau sebesar 93,34%. Dibandingkan dengan tahun tahun 2020, 2021, 2022, 2023 persentase realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengalami kenaikan Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel x. Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat	19.273.361.270	17.447.550.884	90,52
	- Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	0,00	0,00
	- Administrasi Keuangan Perangkat daerah	9.266.796.082	8.821.761.330	95,19
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	613.950.000	538.158.618	87,65
	- Administrasi umum Perangkat Daerah	1.960.653.704	1.684.365.390	85,90
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.767.149.900	2.605.889.840	94,17
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.521.972.584	2.950.694.044	83,77
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.122.839.000	846.681.662	75,40
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	13.691.190.427	12.398.231.969	90,55
	- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.718.344.716	5.570.618.800	97,41
	- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	7.972.845.711	6.827.613.169	85,63
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.544.373.800	3.131.131.977	88.34
	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	3.544.373.800	3.131.131.977	88.34

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2024

4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.763.800.000	9.589.669.630	98,21
	- Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	8.964.000.000	8.964.000.000	100
	- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	799.800.000	625.669.630	78,22
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.031.750.000	1.987.403.500	97,81
	- Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	150.000.000	149.650.000	99,76
	- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.600.000.000	1.588.650.000	99,29
	- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	281.750.000	249.103.500	88,41
6	Program Penataan Bangunan Gedung	18.925.793.000	17.711.246.349	93,58
	- Pemeliharaan Perawatan dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.469.960.000	5.237.260.000	95,74
	- Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1.632.593.000	1.360.825.560	83,35
	- Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	10.787.600.000	10.536.841.739	97,67
	- Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	369.000.000	-	0,00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2024

	- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	666.640.000	576.319.050	86,45
7	Program Penyelenggaraan Jalan	107.883.163.000	101.943.227.635	94,49
	- Penyusunan Rencana, Strategi dan teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4.000.300.000	3.918.740.186	97,96
	- Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan desa	2.600.000.000	2.581.199.175	99,28
	- Rekonstruksi Jalan	92.194.573.500	87.511.284.574	94,92
	- Rehabilitasi Jembatan	475.000.000	259.079.000	54,54
	- Pembangunan Jembatan	6.663.000.000	6.212.689.700	93,24
	- Pemeliharaan Rutin Jalan	1.950.289.500	1.460.235.000	74,87
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.275.688.000	3.224.536.254	75,41
	- Pelaksanaan Persetujuan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten /Kota	1.282.508.000	782.689.609	61,03
	- Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten / Kota	1.236.288.000	1.126.526.680	91,12
	- Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	159.000.000	91.926.624	57,82
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	132.000.000	129.912.608	98,42
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	513.552.000	495.079.190	96,40
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	952.340.000	598.401.543	62,83

Perbandingan capaian realisasi anggaran x lima tahun terakhir (2020 - 2024) adalah sebagai berikut.

No	Tahun	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2020	197.337.335.183	183.334.965.371,08	92,90%
2	2021	180.773.404.399	165.612.185.375,10	91,61%
3	2022	238.444.823.055	211.738.885.864	88,79%
4	2023	257.172.357.776	236.397.611.416,36	91,92%
5	2024	179.389.119.497	167.432.998.198	93,34%

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil uraian capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Dalam tahun 2024, terjadi perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang selaras dengan perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 sehingga ditetapkan bahwa terdapat 5 sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat dengan 8 Indikator Kinerja Utama.
2. Tahun 2022, Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat dalam Rangka mencapai target kinerja dari sasaran strategis dapat dikatakan relatif tercapai. Rata – rata capaian kinerja mencapai 100% dari seluruh capaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat. Dirincikan lebih lanjut, untuk sasaran strategis 1 dengan realisasi 62,44% dari target yang ditetapkan 59,80%, sasaran strategis 2 dengan realisasi ... dari target yang ditetapkan ... , sasaran 3 realiasi 100% dari target 100%, sasaran 4 realisasi 29,12% dari target 33% dan sasaran 5 realisasi B dengan target ditetapkan B.
3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada sasaran strategis 1 capaian realisasi kinerja diperoleh sebanyak 104,41%.
4. Untuk realisasi capaian anggaran, pada sasaran strategis 1 persentase serapan anggaran mencapai 94,49%.

Langkah kedepan yang akan dilakukan adalah :

Untuk meningkatkan Pencapaian Indikator agar sesuai dengan target yang direncanakan kami akan memprioritaskan kegiatan yang focus dan berdampak langsung yang signifikan untuk mencapai target yang telah direncanakan terutama terhadap ruas jalan dan jembatan dan infrastruktur yang prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Dan menyampaikan permintaan penambahan pagu anggaran karena dalam pencapaian indicator memerlukan konsistensi pendanaan yang memadai dan juga akan melakukan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan Dinas PUTR.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 3, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat

Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20814

Telepon/Faksimile : (061) 8910616, Email : dpuprkablangkat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khairul Azmi, S.STP

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP

Jabatan : Pj. Bupati Langkat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Stabat, 04 Maret 2024

Pihak Kedua

Pj. Bupati Langkat,

H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP

Pihak Pertama

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Langkat,



Khairul Azmi, S.STP

Pembina / IV.a

NIP 19850216 200312 1 001

PERJANJIAN KINERJA 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LANGKAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan dan Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	59,8%
		Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik	600 Unit
2.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur yang Mencakup Layanan Air Minum, Layanan Persampahan, Layanan Sanitasi dan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Pelayanan Air Minum	15%
		Persentase Infrastruktur Persampahan yang Dibangun	100%
		Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	96%
		Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	64%
3.	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100 %
4.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Bencana Banjir	Persentase Wilayah Rawan Bencana Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur	33 %
5.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (70-80)

Program		Anggaran	
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp	6.729.702.171
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	1.279.250.000
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	286.500.000
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	1.091.750.000
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	10.191.493.000

Program	Anggaran
6. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 29.694.304.300
7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 2.485.748.000
8. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 19.996.104.698

Stabat, 04 Maret 2024

Pihak Kedua,

Plt. Bupati Langkat,



H. M. Faisal Hasrimy, AP., M.AP

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Langkat,



Khairul Azmi, S.STP
Pembina / IV.a
NIP 19850216 200312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 3, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat
Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20814

Telepon/Faksimile : (061) 8910616, Email : dpuprkablangkat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Surya Dharma Ginting, S.T, M.T

Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Khairul Azmi, S.STP

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Stabat, 04 Maret 2024

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Langkat


Khairul Azmi, S.STP
Pembina / IV.a
NIP 19850216 200312 1 001

Pihak Pertama

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Langkat


Surya Dharma Ginting, S.T, M.T
Pembina / IV.a
NIP 19791211 200604 1 008

PERJANJIAN KINERJA 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LANGKAT

No.	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
		Nilai Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (70-80)

Kegiatan		Anggaran	
1.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	12.447.864.474
2.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	379.950.000
3.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1.333.558.640
4.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	1.876.980.000
5.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	3.144.912.584
6.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	812.839.000

Stabat, 04 Maret 2024

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Langkat


Khairul Azmi, S.STP
Pembina / IV.a
NIP 19850216 200312 1 001

Pihak Pertama,

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Langkat


Surya Dharma Ginting, S.T, M.T
Pembina / IV.a
NIP 19791211 200604 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 3, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat
Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20814

Telepon/Faksimile : (061) 8910616, Email : dpuprkablangkat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Irfandi, S.T, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kab. Langkat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Khairul Azmi, S.STP

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Stabat, 04 Maret 2024

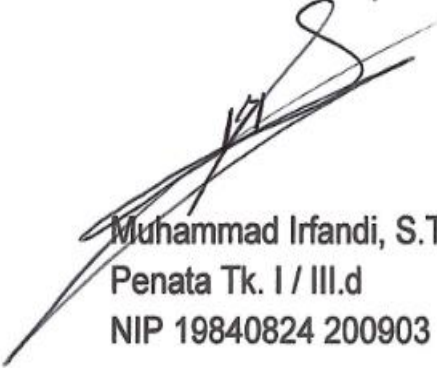
Pihak Kedua

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Langkat


Khairul Azmi, S.STP
Pembina / IV.a
NIP 19850216 200312 1 001

Pihak Pertama

Kepala Bidang Bina Marga
Dinas PUTR Kabupaten Langkat


Muhammad Irfandi, S.T, M.Si
Penata Tk. I / III.d
NIP 19840824 200903 1 003

PERJANJIAN KINERJA 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LANGKAT

No.	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan yang Ditangani sesuai SK Jalan Kabupaten	842 Km
		Jumlah Jembatan yang Dibangun dan yang Direhabilitasi sesuai SK Jembatan Kabupaten	800 Unit
		Database Kondisi Jalan	1 Dokumen

Kegiatan	Anggaran
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kabupaten/ Kota	Rp 29.694.304.300

Stabat, 04 Maret 2024

Pihak Kedua,

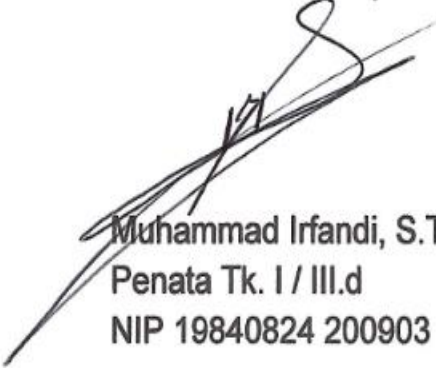
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Langkat



Khairul Azmi, S.STP
Pembina / IV.a
NIP 19850216 200312 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Bina Marga
Dinas PUTR Kabupaten Langkat



Muhammad Irfandi, S.T, M.Si
Penata Tk. I / III.d
NIP 19840824 200903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 3, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat
Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20814

Telepon/Faksimile : (061) 8910616, Email : dpuprkablangkat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ario Darmanta Ginting, S.T

Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Kab. Langkat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Khairul Azmi, S.STP

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Stabat, 04 Maret 2024

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Langkat

Khairul Azmi, S.STP

Pembina / IV.a

NIP 19850216 200312 1 001

Pihak Pertama

Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas PUTR Kabupaten Langkat

Ario Darmanta Ginting, S.T

Penata Tk. I / III.d

NIP 19781207 201101 1 005

PERJANJIAN KINERJA 2024

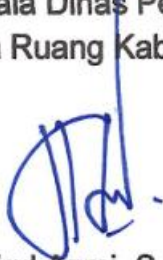
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LANGKAT

No.	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur yang Mencakup Layanan Air Minum	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) dalam Kondisi Baik	20.200 SR
2.	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Layanan Persampahan yang Baik	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam Kondisi Baik	10 Unit
3.	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur yang Mencakup Layanan Air Limbah	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dalam Kondisi Baik	168.250 Unit
4.	Meningkatnya Infrastruktur Sistem Drainase Perkotaan yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Jumlah Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	50.000 m
5.	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100 %

Kegiatan		Anggaran	
1.	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp	1.279.250.000
2.	Terlaksananya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah	Rp	286.500.000
3.	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Rp	1.091.750.000
4.	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp	10.191.493.000

Stabat, 04 Maret 2024

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Langkat


Khairul Azmi, S.STP
Pembina / IV.a
NIP 19850216 200312 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Cipta Karya
Dinas PUTR Kabupaten Langkat


Ario Darmanta Ginting, S.T
Penata Tk. I / III.d
NIP 19781207 201101 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 3, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat
Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20814

Telepon/Faksimile : (061) 8910616, Email : dpuprkablangkat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deni Turio, S.T

Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi Dinas PUTR Kab. Langkat
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Khairul Azmi, S.STP

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Stabat, 04 Maret 2024

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Langkat

Khairul Azmi, S.STP

Pembina / IV.a

NIP 19850216 200312 1 001

Pihak Pertama

Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina
Konstruksi Dinas PUTR Kab. Langkat

Deni Turio, S.T

Pemata Tk. I / III.d

NIP 19790729 201001 1 018

PERJANJIAN KINERJA 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LANGKAT

No.	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Kebijakan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Tata Ruang	1

Kegiatan		Anggaran	
1.	Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)	Rp	1.680.296.000
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	645.552.000
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Rp	159.900.000

Stabat, 04 Maret 2024

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Langkat


Khairul Azmi, S.STP
Pembina / IV.a
NIP 19850216 200312 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina
Konstruksi Dinas PUTR Kab. Langkat


Deni Turo, S.T
Pegawai Tk. I / III.d
NIP 19790729 201001 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 3, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat
Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20814

Telepon/Faksimile : (061) 8910616, Email : dpuprkablangkat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Yusuf Nasution, S.T

Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUTR Kab. Langkat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Khairul Azmi, S.STP

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Stabat, 04 Maret 2024

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Langkat

Khairul Azmi, S.STP

Pembina / IV.a

NIP 19850216 200312 1 001

Pihak Pertama

Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas PUTR Kabupaten Langkat

Muhammad Yusuf Nasution, S.T

Penata Tk. I / III.d

NIP 19830102 201101 1 012

PERJANJIAN KINERJA 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LANGKAT

No.	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air untuk Mendukung Pendayagunaan serta Pengendalian Daya Rusak Air	Jumlah Bantaran dan Tanggul Sungai dalam Kondisi Baik	42.205 m
		Panjang Sungai yang Terkonservasi	12.750 m
		Panjang Turap/ Talud dan Bronjong yang Dibangun	11.421 m
		Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi	85 %

Kegiatan		Anggaran	
1.	Meningkatnya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) untuk Mencegah Daya Rusak Air	Rp	1.817.598.450
2.	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi dengan Luas di Bawah 1.000 Ha	Rp	2.341.449.442

Stabat, 04 Maret 2024

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Langkat



Khairul Azmi, S.STP
Pembina / IV.a
NIP 19850216 200312 1 001

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas PUTR Kabupaten Langkat



Muhammad Yusuf Nasution, S.T
Penata Tk. I / III.d
NIP 19830102 201101 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 3, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat
Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20814

Telepon/Faksimile : (061) 8910616, Email : dpuprkablangkat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rismayani, S.E

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Dinas PUTR Kab. Langkat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Surya Dharma Ginting, S.T, M.T

Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Stabat, Maret 2024

Pihak Kedua

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Langkat

Surya Dharma Ginting, S.T, M.T
Pembina / IV.a
NIP 19791211 200604 1 008

Pihak Pertama

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
Dinas PUTR Kabupaten Langkat

Rismayani, S.E
Penata / III.d
NIP 19830820 201001 2 031

PERJANJIAN KINERJA 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LANGKAT

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	100 %

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Rp 12.447.864.474

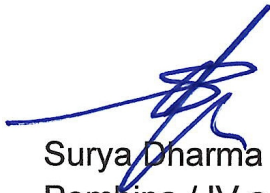
Stabat, Maret 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Langkat

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
Dinas PUTR Kabupaten Langkat



Surya Dharma Ginting, S.T, M.T
Pembina / IV.a
NIP 19791211 200604 1 008



Rismayani, S.E
Penata / III.c
NIP 19830820 201001 2 031



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 3, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat
Kabupaten Langkat, Sumatera Utara 20814

Telepon/Faksimile : (061) 8910616, Email : dpuprkablangkat@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fissamawati, S.H

Jabatan : Ka. Sub. Bagian Umum, Perencanaan dan informasi Publik Dinas PUTR
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Surya Dharma Ginting, S.T, M.T

Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Stabat, Maret 2024

Pihak Kedua

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Langkat

Surya Dharma Ginting, S.T, M.T
Pembina / IV.a
NIP 19791211 200604 1 008

Pihak Pertama

Ka. Sub. Bagian Umum, Perencanaan
dan Informasi Publik Dinas PUTR

Fissamawati, S.H
Penata / III.c
NIP 19741220 200701 2 006

PERJANJIAN KINERJA 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LANGKAT

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %

Sub Kegiatan

Anggaran

1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	79.950.000
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	300.000.000
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp	15.952.605
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	315.970.885
5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	36.604.950
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	56.000.000
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	160.030.200
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Rp	24.000.000
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	725.000.000
10.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	382.855.000
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	460.800.000
12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	2.684.112.584

Sub Kegiatan

Anggaran

13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Rp	492.839.000
--	----	-------------

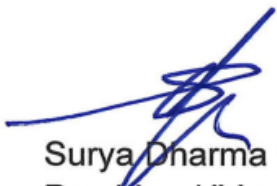
Stabat, Maret 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Langkat

Ka. Sub. Bagian Umum, Perencanaan
dan Informasi Publik Dinas PUTR



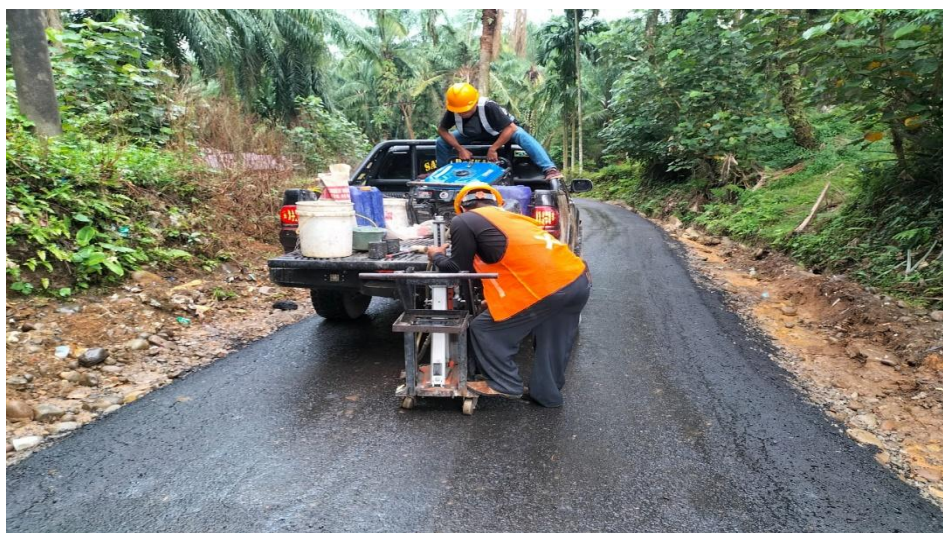
Surya Dharma Ginting, S.T, M.T
Pembina / IV.a
NIP 19791211 200604 1 008



Fissamawati, S.H
Penata / III.c
NIP 19741220 200701 2 006

Lampiran 2. Dokumen Lainnya

Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan rekonstruksi jalan, pemeliharaan rutin, serta peningkatan jalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2024 :



Gambar Pengaspalan Jalan dengan Hotmix Dusun Penusunan Kec. Salapian



Gambar Pengaspalan Jalan dengan Hotmix Desa Baja Kuning Kec. Tanjung Pura